

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2018, telah terjadi dua gempa besar yang menyebabkan banyak korban dan kerugian harta benda di Indonesia. Gempa bumi Lombok 5 Agustus 2018 berkekuatan 7,0 magnitudo pada pukul 19.46 WITA. Gempa bumi yang diikuti tsunami ini mengakibatkan 483 orang meninggal dunia, 1413 luka-luka dan 431.416 warga mengungsi (BNPB, 2018). Setelah satu setengah bulan terjadi Gempa bumi dan tsunami Palu dan Donggala pada 28 September 2018 berkekuatan 7,7 magnitudo pada pukul 18.02 WITA. Gempa bumi dan tsunami ini mengakibatkan 65.733 bangunan rusak dan sebanyak 2113 orang meninggal dunia serta 70.821 warga mengungsi di 141 titik.

Sesaat setelah terjadi bencana, permintaan terhadap bantuan logistik para korban bencana merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dipenuhi sesegera mungkin karena kendala yang terjadi seperti banyaknya akses jalan yang rusak, kurangnya transportasi bantuan logistik untuk disalurkan ke pengungsi. Kedua bencana tersebut mengakibatkan kebutuhan terhadap bantuan logistik semakin besar, seperti tenda, selimut, makanan siap saji, terpal alas tidur, air bersih, kendaraan untuk distribusi logistik (BNPB, 2018).

Kurangnya pasokan logistik, mengakibatkan bertambahnya penderitaan korban. Korban menjadi tidak sabar sehingga mereka mendatangi sumber tempat masuknya logistik seperti bandara serta melakukan blokade di bandara dan melakukan penjarahan di mini market yang ada di Kota Palu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kurangnya kesiapan logistik terhadap bencana dari pemerintah Palu, padahal bencana ini sudah di perkirakan akan terjadi (Buku Peta Gempa 2017).

Logistik merupakan hal penting dalam penanganan bencana dan merupakan aktivitas utama dalam masa penanganan darurat. Aktivitas ini mencapai 80% dari keseluruhan aktivitas pada masa tanggap darurat (Patrisina 2017). Perencanaan *logistics* yang baik dalam menghadapi bencana akan dapat memperpendek waktu respon sehingga dapat mencegah atau mengurangi bertambahnya korban jiwa, penderitaan korban dan mempercepat waktu pemulihan (*recovery time*) sehingga korban dapat segera kembali ke kondisi normal seperti sebelum bencana terjadi (Patrisina 2017).

Sumatera Barat telah diprediksi oleh Sieh (2006) akan mengalami gempa bumi yang berpotensi tsunami sebagaimana halnya yang terjadi di Palu. Kekuatan gempa yang akan terjadi Sumatera Barat diprediksi akan lebih besar dari gempa yang terjadi di Palu yaitu sebesar 8,9 *Magnitudo*. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kalau memang terjadi gempa dan tsunami di Sumatera Barat sebagaimana yang telah di prediksi oleh Sieh (2006) maka kondisi di Sumatera Barat bisa jadi lebih parah dari gempa dan tsunami yang terjadi di Palu. Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah penduduk yang akan terdampak gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk terdampak bencana gempa bumi dan tsunami di Sumatera Barat.

No	Nama Daerah	Jumlah penduduk (orang)
1	Kab. Pesisir Selatan	457.285
2	Kota Padang	914.968
3	Kab. Padang Pariaman	408.612
4	Kota Pariaman	85.691
5	Kab. Agam	480.722
6	Kab. Pasaman Barat	418.785
7	Kab. Mentawai	86.981

(Sumber : BPS Sumatera Barat 2016)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari 7 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang terdampak gempa bumi dan tsunami Kota Padang memiliki jumlah penduduk terdampak paling banyak. Dari 914.968 jiwa yang berada di Kota Padang, jumlah penduduk yang terdampak bencana gempa bumi dan tsunami

adalah sebanyak 273.755 jiwa. Jika memang bencana itu terjadi apakah pemerintah Sumatera Barat khususnya Kota Padang telah siap menangani situasi logistik seperti yang terjadi di Palu. Bagaimanakah kesiapan logistik Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami dengan jumlah penduduk terdampak sebanyak 273.755 jiwa.

Renno (2011) telah merancang komponen dan indikator untuk mengukur level kesiapan sistem logistik untuk penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami. Komponen yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut ada 2 komponen. Komponen 1 yaitu distribusi dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan mekanisme yang disusun dengan mempertimbangkan keterpaparan bencana daerah. Komponen ini memiliki 3 indikator, yaitu : 1) Tersedianya rencana kebutuhan dan pendistribusian logistik untuk darurat bencana berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun secara partisipatif dan selalu diperbarui secara berkala, 2) Penyelenggaraan distribusi logistik penanganan darurat bencana berdasarkan prosedur dan mekanisme yang efektif dan relevan yang diuji coba dan diperbarui secara berkala, 3) Tersedianya dukungan daerah tetangga dengan mengembangkan kerja sama lintas batas untuk mempercepat proses tanggap darurat bencana berdasarkan kajian risiko lintas batas yang selalu diperbarui secara berkala.

Sedangkan komponen 2 yaitu mempersiapkan sumber daya untuk mendukung proses distribusi logistik yang efektif guna mempercepat proses penanganan darurat bencana. Komponen ini memiliki 5 indikator, yaitu : 1) Sumber daya manusia dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pendistribusian logistik saat darurat bencana dengan kapasitas memadai, 2) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi memadai yang menunjang pendistribusian logistik untuk kebutuhan darurat pada setiap daerah dan level komunitas 3) Tersedianya dukungan informasi dan komunikasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah terpapar bencana untuk menjamin kebutuhan darurat bencana 4) Mengembangkan pendekatan terpadu terhadap penyimpanan dan penanganan pasokan diseluruh jaringan logistik guna mempercepat proses distribusi logistik untuk kebutuhan

darurat bencana, 5) Dukungan finansial yang memadai dipersiapkan dalam APBN/APBD untuk memfasilitasi pelaksanaan sistem logistik penanganan darurat bencana secara efektif. Penelitian ini belum mempertimbangkan tingkat kepentingan komponen dan indikator sehingga pada bagian saran Henmaidi dkk (2017) menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait penentuan prioritas dan tingkat kepentingan indikator. Karena terdapat kemungkinan masing-masing komponen dan indikator memiliki tingkat kepentingan yang berbeda.

Emetia (2011) menggunakan komponen dan indikator yang telah dirancang oleh Renno (2011) untuk mengukur tingkat kesiapan logistik Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Emetia (2011) menyimpulkan bahwasanya tingkat kesiapsiagaan sistem logistik di Kota Padang untuk penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami secara keseluruhan masih rendah yaitu berada pada level 2 (*range* nilai 36,1-52) dari 5 level dengan nilai kesiapan wilayah yang diperoleh dari rata-rata nilai komponen sebesar 38.

Setelah 8 tahun penelitian dilakukan sejak tahun 2011 terdapat kemungkinan telah banyak terjadi perubahan dan persiapan yang dilakukan oleh Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami yang diprediksi akan terjadi. Pada tahun 2018 telah terjadi 52 gempa yang berada di perairan Sumatera Barat, letaknya di daerah Mentawai dan ini bisa menjadi pemicu gempa besar, karena pusat gempa berada disekitar pusat Sumatera Megatruster. Bagaimanakah tingkat kesiapan logistik Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. “Bagaimanakah tingkat kepentingan komponen dan indikator kesiapan logistik bencana”
2. “Bagaimanakah tingkat kesiapan logistik Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa bumi dan Tsunami”.
3. “Bagaimana strategi pengembangan terhadap komponen dan indikator serta tingkat kesiapan logistik Kota Padang”

1.3. Tujuan Penelitian

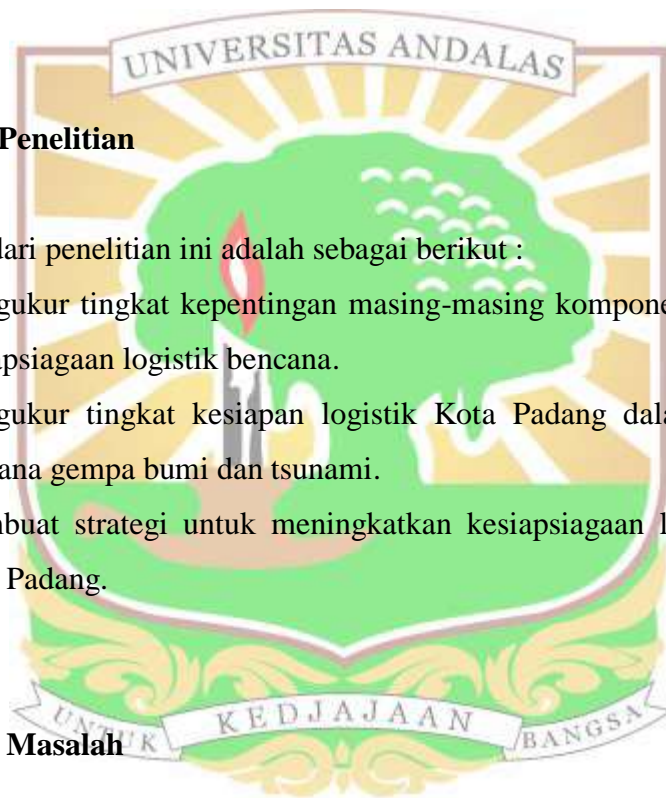
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengukur tingkat kepentingan masing-masing komponen dan indikator kesiapsiagaan logistik bencana.
2. Mengukur tingkat kesiapan logistik Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.
3. Membuat strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan logistik bencana Kota Padang.

1.4. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran kesiapsiagaan bencana hanya pada lingkup logistik.
2. Pengambilan data yang menjadi studi kasus adalah Kota Padang.



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian mengenai sistem logistik bencana, perumusan masalah yang mengukur level tingkat kesiapan wilayah menghadapi bencana, tujuan dilakukan penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan mengenai teori-teori tentang humanitari logistik, AHP, manajemen logistik serta hal-hal yang akan mendukung penelitian dan sebagai media dalam memecahkan permasalahan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan penelitian dalam mengukur tingkat kesiapan Logistik Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini merupakan lanjutan yang dilakukan dalam penelitian untuk melakukan pengolahan data dan pengumpulan data dengan menghitung tingkat kepentingan antar indikator menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan mengukur level kesiapsiagaan bencana Kota Padang dalam segi logistik.

BAB V ANALISIS

Bab ini berisikan tentang analisis terhadap pengolahan data yang telah dilakukan. Analisis yang dilakukan antara lain adalah analisis perhitungan bobot kepentingan indikator, analisis terhadap level kesiapan logistik bencana Kota Padang, serta analisis terhadap strategi pengembangan indikator.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari tujuan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

